

# **Pengaruh Independensi, Keahlian, Frekuensi Rapat, dan Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Penerbitan *Sustainability Report* ISRA 2008-2012**

**Ilyona Risty dan Sany**  
Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra  
Email: sany@petra.ac.id

## **ABSTRAK**

Pertimbangan mengenai dampak dari isu lingkungan telah menimbulkan perhatian bagi perusahaan khususnya *stakeholder*. Perusahaan mulai menyadari untuk menerbitkan sebuah laporan yang berisi kegiatan bertanggung jawab perusahaan yang dilakukan dengan lebih memperhatikan kerangka global yang mudah dipahami dan diukur yang disebut dengan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) atau yang dikenal dengan *CSR report*. Pedoman pelaporan ini diatur dan dikembangkan di dalam *Global Reporting Initiative (GRI)*. Pedoman ini telah diadopsi oleh banyak perusahaan termasuk di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pengaruh variabel independensi, keahlian, frekuensi rapat dan jumlah komite audit berpengaruh terhadap penerbitan *sustainability report*. Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol di dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di ISRA 2013 dan Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel penelitian ditentukan berdasarkan *purpose sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil analisis menemukan bahwa frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerbitan *sustainability report*.

**Kata kunci:** Komite Audit, *Sustainability Reporting*, CSR Report.

## **ABSTRACT**

*Consideration of environment issue impact has caused particular concern for the company stakeholders. The company began disclose a report containing the corporate responsibility activities undertaken by more attention to the global framework that is easy to understand and measure the called sustainability reporting, known as CSR report. The reporting guidelines are organized and developed within the Global Reporting Initiative (GRI). These guidelines have been adopted by many companies, including in Indonesia. The purpose of this research is to know the influence of variable independence, expertise, frequency of meetings and the number of audit committees on the disclosure of sustainability report. the size of company is a control variable in this research. The population of this study is all companies registered in ISRA 2013 and the sample is determined by purposive sampling method. The analytical method used is logistic regression analysis. The results of the analysis found that only the frequency of meetings and the size of the companies that affect the sustainability report disclosure.*

**Keywords:** *audit committee, sustainability reporting, CSR reports.*

## **PENDAHULUAN**

Pertimbangan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari isu lingkungan telah menarik perhatian bagi perusahaan seiring dengan adanya tuntutan dalam pemenuhan tanggungjawab

perusahaan terhadap aktivitas bisnisnya. Adanya peraturan Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang menyatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan. Melalui peraturan ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya tetapi juga komunitas dan lingkungan di mana perusahaan melaksanakan setiap aktivitas bisnisnya. Sehingga isu lingkungan ini telah menyangkut stakeholder secara keseluruhan. Sejalan dengan hal itu, investor mulai lebih fokus dalam menilai bagaimana cara perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab di bidang sosial, yang tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan saja (Barnett & Salomon, 2006). Hal inilah yang mendorong organisasi untuk berfokus kepada perilaku yang bertanggungjawab secara sosial baik moral maupun secara praktek (Marom, 2006).

Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan maka, perusahaan berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya dalam meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan itu, perusahaan mulai menyadari pentingnya untuk menerbitkan sebuah laporan yang berisi kegiatan bertanggung jawab perusahaan yang dilakukan dengan lebih memperhatikan kerangka global yang mudah dipahami dan diukur. Catatan atas kegiatan yang dilakukan dibuat dan dipublikasikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan yang sering disebut dengan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) atau CSR (Corporate social responsibility) (Dilling, 2010). Laporan ini telah dikembangkan untuk mencapai keseragaman dalam pengungkapannya yang dikembangkan berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Organisasi ini merupakan organisasi nonprofit terletak di Belanda, dimana negara-negara Eropa telah mewajibkan publikasi laporan ini berdasarkan standar. Laporan ini berisi semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban sosial kepada para stakeholder perusahaan. *Sustainability report* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang didasarkan pada tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dikenal dengan *triple bottom line* (Boyd, 2009). Perusahaan bisnis yang lebih menekankan pada peningkatan yang berkelanjutan akan berfokus pada kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan (Colbert, 2007)

*Sustainability report* dilaporkan guna menciptakan transparansi bagi para stakeholder (*Sustainability reporting Guidelines*, 2006). Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan stakeholder terhadap pertanggungjawaban yang telah dilakukan. *Sustainability report* tersebut juga menjadi bagian dari komunikasi antara stakeholder dan organisasi yang menyediakan

informasi dari setiap aktivitas organisasi yang dapat mengubah persepsi dan harapan (Carol & Carlos, 2007). Tetapi dalam hal penerapannya, seringkali motif perusahaan hanya sebatas karena adanya tuntutan peraturan dan menghindari image yang buruk dari masyarakat (Runhaar & Lafferty, 2009).

Salah satu karakteristik dari komite audit adalah sifatnya yang independen. Independensi komite audit sering dianggap sebagai karakteristik yang penting yang dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan (Baxter & Cotter, 2009). Persons (2005) menemukan hubungan yang negatif antara independensi komite audit dan kemungkinan restatement laporan keuangan serta fraud dari pelaporan keuangan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Abbott et al (2004) bahwa independensi dari komite audit berpengaruh negatif terhadap restatement laporan keuangan.

Kemampuan dan keahlian komite audit di bidang keuangan adalah karakteristik yang penting dalam menjalankan aktivitas operasi komite audit (Baxter & Cotter, 2009). Defond et al (2005) menemukan bahwa komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan merupakan faktor yang penting untuk menghambat terjadinya tindakan manipulasi laba. Penelitian (Lisic et al, 2012) menyatakan bahwa keahlian dari komite audit juga tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan dan pengungkapan etika organisasi.

Jumlah anggota komite audit dan frekuensi rapat juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika secara sukarela (Persons, 2008). Sehingga semakin besar frekuensi rapat maka semakin detail hal-hal yang dibicarakan sehubungan dengan pengungkapan etika secara sukarela.

Perusahaan besar yang *go public* cenderung memiliki kode etik yang isinya bervariasi di seluruh perusahaan (Seganish & Holter, 2004). Kurangnya standar mengingat tidak terdapat aturan yang jelas mengenai format baku yang berlaku secara global maka pengungkapan *sustainability report* hanya bersifat sukarela (Dilling, 2010). Di Indonesia penerbitan *sustainability report* masih tergolong sangat rendah mengingat perusahaan yang mengikuti *sustainability reporting award* tahun 2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya 25 perusahaan. Menurut National Center for *Sustainability reporting* (NCSR), jumlah perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan di Indonesia paling tinggi di kawasan Asia Tenggara, namun tetap saja lembaga ini masih memandang bahwa kesadaran perusahaan-

perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah dalam pembuatan *sustainability report*. National Center for *Sustainability reporting* (NCSR) adalah perusahaan nonprofit yang bertujuan untuk mendorong dan mempromosikan penggunaan *sustainability report* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia berdasarkan kerangka pelaporan yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), (National Center for *Sustainability reporting*).

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah apakah independensi, keahlian, frekuensi rapat, dan jumlah rapat berpengaruh terhadap penerbitan *sustainability report*.

### **Teori Stakeholder**

Stakeholder adalah orang atau kelompok yang mempunyai kepemilikan atau klaim, atau kepentingan di dalam perusahaan dan kegiatannya di masa lalu, sekarang, atau masa depan (Clarkson, 1995). Teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan mengenai tanggung jawab dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi organisasi dan lingkungannya. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan sifat hubungan antara organisasi dan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam operasi dan hasil kegiatan usaha organisasi (Benn & Bolton, 2013).

Gagasan *business-driven perspective* mengenai teori stakeholder yang menyatakan bahwa organisasi memiliki kelompok pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kelompok tersebut dimana interaksi yang terjadi akan berdampak pada pemangku kepentingan tertentu dan organisasi yang akan menghasilkan perspektif yang menonjol yang akan mempengaruhi pilihan strategis dari kelangsungan hidup perusahaan, sehingga untuk mencapai kemakmuran dalam menjalankan aktivitas bisnisnya diperlukan relasi yang baik antara organisasi, komunitas, atau konstitusi selain yang bersentuhan langsung dengan perusahaan (Kakabadse, Rozuel, & Davies, 2005). Hal ini menyebabkan perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan dari para pemangku kepentingan, salah satunya dalam hal pertanggungjawaban aktivitas sosial perusahaan.

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi didasarkan atas gagasan bahwa bisnis beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial di mana organisasi setuju untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai balasan atas diterimanya tujuan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan dan

penghargaan lainnya (Guthrie & Parker, 1989). Menurut Wartick & Mahon (1994) kesenjangan legitimasi mungkin diakibatkan karena: kinerja perusahaan berubah sementara harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tetap sama, harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah sementara kinerja perusahaan sendiri tetap sama, dan baik kinerja perusahaan dan harapan masyarakat sama-sama berubah, tetapi bergerak ke arah yang berbeda atau bergerak ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

(Archehr et al, 2009) ketika menajer bisnis memahami ketika terjadi kesenjangan legitimasi, maka mereka akan menetapkan strategi yang berbeda diantaranya: Menyelaraskan keinginan masyarakat dengan perilaku organisasi, mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan, dan mendapatkan perhatian dan persepsi yang baik dari masyarakat dengan cara memanipulasi, menipu ataupun sekedar menarik perhatian.

Menurut O'Donovan (2002) pengurangan dari gap legitimasi dapat dilakukan dengan memperluas wilayah kesesuaian antara operasi perusahaan dengan pengharapan masyarakat dengan cara melakukan strategi legitimasi dan melakukan pendekatan social disclosure. Pengungkapan sosial dilakukan dalam menanggapi ekspektasi masyarakat terhadap organisasi dan juga dalam menanggapi perubahan persepsi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan melalui media komunikasi utama perusahaan yang dituangkan dalam bentuk laporan yang disebut dengan *sustainability report* atau *CSR report* yang berisi tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

### **Teori Agensi**

Teori agensi berfokus pada hubungan antar dua pihak yaitu agent dan principle yang diarahkan di dalam governance perusahaan (Benn & Bolton, 2013). Diasumsikan bahwa fungsi governance dijalankan oleh agent dengan memaksimalkan sumber daya perusahaan yang ada. Pemegang saham akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan untuk agen (Al-Shammari & Al-Sultan, 2010). Situasi ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara principle dan agent. Kedua belah pihak akan memaksimalkan keuntungan masing-masing, dan tidak ada alasan untuk selalu

memperdayai bahwa agent akan selalu bertindak untuk kepentingan principle. Hal inilah yang menimbulkan masalah keagenan, sehingga solusi untuk masalah tersebut memerlukan biaya untuk memastikan agent bertindak sesuai dan selaras dengan kepentingan principle. Model teori agensi merupakan hubungan ekonomi yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang menempatkan kompetensi pada nilai tertinggi untuk mencapai peningkatan laba (Caldwell, Karri, & Vollmar, 2006). Agent akan berusaha dalam memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan memenuhi tujuan ekonomi dari principal.

Teori Agensi menyediakan kerangka kerja untuk mempelajari hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan secara sukarela karena keduanya dapat dianggap sebagai mekanisme di dalam kontrol perusahaan untuk melindungi investor dan mengurangi konflik agency (Allegrini & Greco, 2011). Konflik yang berkurang akan mengurangi asimetri informasi yang dilakukan melalui voluntary disclosure yang merupakan akses yang lebih baik yang dapat digunakan di dalam perusahaan (Al-Shammari & Al-Sultan, 2010).

### **Komite Audit**

*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan direksi dengan tujuan untuk mengawasi proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta audit laporan keuangan. Komite audit merupakan cerminan dari dewan direksi (Alleyne, Howard, & Greenidge, 2006). Dimana mereka memiliki posisi yang unik dalam kerangka akuntabilitas perusahaan karena mereka memberikan dimensi konstruktif dalam membantu direksi menjalankan tanggung jawab organisasi (Braiotta, Gazzaway, Colson, & Ramamoorti, 2010). Komite Audit merupakan sub komite dari direktur utama perusahaan yang terbentuk dari direktur non eksekutif yang tugasnya berhubungan dengan pelaporan keuangan dan audit (Spira, 1999).

Menurut Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawasan dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. BAPEPAM dalam Surat Edaran 2003 menyatakan bahwa tujuan

komite audit adalah membantu dewan direksi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

### **Sustainability Report**

*Sustainability report* merupakan hasil pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang menggambarkan kinerja organisasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI). *Sustainability reporting* mempunyai tujuan yang mulia, yang tidak akan mencapai kematangan dan kredibilitas, sampai adanya pengukuran, pelaporan, dan jaminan yang jelas dari organisasi (Moore, 2012). Di dalam penerapannya belum ada definisi secara global mengenai *sustainability reporting* atau CSR (Dilling, 2010).

Pengembangan dari *sustainability report* merupakan tanggungjawab perusahaan mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap peran perusahaan secara global, dimana pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik dengan harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan (Dilling, 2010). Hal inilah yang menjadi alasan untuk lebih baik dalam mengelola aktivitas perusahaan yang dilaporkan dengan transparan.

*Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang mengembangkan dan menerbitkan pedoman *sustainability reporting* secara sukarela yang berlaku secara global. GRI dibentuk pada tahun 1997 yang diprakarsai oleh United Nations Environment Program tahun 2002 yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. GRI mengembangkan pedoman *sustainability report* dengan menggabungkan organisasi bisnis, akuntansi, investasi, lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan dari seluruh dunia. Kegiatannya melibatkan ribuan profesional dan organisasi dari berbagai sektor dan daerah.

*Sustainability reporting Award* (SRA) merupakan program yang dirancang untuk memberikan penghargaan tahunan bagi perusahaan atau organisasi yang telah mengembangkan dan menerbitkan *sustainability reporting* dan *CSR report*

melalui web perusahaan. Program ini disebut sebagai ISRA (Indonesia *sustainability report award*). ISRA merupakan program yang difasilitasi oleh National Center for *Sustainability reporting* (NCSR). NCSR merupakan suatu organisasi independen yang dibangun berdasarkan konsep CSR dengan tujuan membantu, mengembangkan, mengukur dan melaporkan pelaksanaan CSR di Indonesia. NCSR berdiri pada tanggal 23 Juni 2005 dengan lima organisasi independen di dalamnya yaitu Management Accountants Institute (IAMI / prev. IAI-KAM), the Indonesian-Netherlands Association (INA), National Committee on Governance (KNKG), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) and the Public Listed Companies Association (AED).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menguji pengaruh independensi, keahlian, frekuensi rapat, dan jumlah komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif. Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik.

Definisi dan cara mengukur masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. *Sustainability report*:

Pengungkapan *sustainability report* diukur menggunakan variabel dummy yaitu 1 bila menerbitkan *sustainability report* dan 0 bila tidak menerbitkan.

b. Independensi Komite Audit

Jumlah komite audit independen dibagi dengan total komite audit.

c. Kehalian Komite Audit

Jumlah komite audit berpengalaman di bidang akuntansi atau keuangan dibagi dengan total komite audit

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit dalam 1 tahun.

e. Jumlah Anggota Komite Audit

Jumlah seluruh komite audit.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*size*) yang diprosikan melalui logaritma natural dari total aset perusahaan.

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.

Sampel di dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori: perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dan perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report*. Sampel diambil

dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ISRA 2013 sebanyak 26., Perusahaan yang *sustainability report*nya tidak tersedia di web ISRA 2013 dan web perusahaan sebanyak 7. Sehingga jumlah akhir perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* diperoleh 19 perusahaan.

Perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report* sebanyak 19 perusahaan. Perusahaan ini merupakan perwakilan dari setiap sektor yang dapat dilihat pada tabel 1. Pembagian sektor industri diambil berdasarkan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh Jakarta Stock Exchange Industrial Classification

**Tabel 1. Deskripsi Sektor Perusahaan**

No	Sektor Industri	Jumlah
1.	Pertanian	1
2.	Pertambangan	4
3.	Industri dasar dan kimia	1
4.	Aneka Industri	1
5.	Industri barang dan konsumsi	1
6.	Properti dan Real Estate	3
7.	Infrastruktur, utilitas, dan Transportasi	5
8.	Keuangan	2
9.	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	1
<b>Total Perusahaan</b>		<b>19</b>

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan *website* perusahaan berupa *annual report* dan *sustainability report* tahun 2008-2012.

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi logistik. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$SR = \alpha_0 + \alpha_1 AUINDP + \alpha_2 AUEXCT + \alpha_3 AUMEET + \alpha_4 AUSIZE + \alpha_5 TASIZE$$

Keterangan:

SR = Variabel dummy, jika menerbitkan *sustainability report* diberi nilai 1 bila menerbitkan dan 0 bila tidak menerbitkan.

AUINDP = Proporsi anggota komite independen

AUEXCT = Proporsi keahlian anggota komite audit

AUSIZE = Jumlah anggota komite audit

AUMEET = Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun

TASIZE = Ukuran perusahaan diprosikan melalui logaritma natural total aset perusahaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif dari tabel 2 menunjukkan nilai independensi yang tinggi sebesar 1,00 menunjukkan semakin banyaknya anggota komite audit yang bersifat independen.

Pada variabel keahlian komite audit (AUEXCT) nilai 1,00 menunjukkan bahwa semua anggota komite audit memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Pada variabel frekuensi rapat komite audit (AUMEET) jumlah frekuensi rapat yang tertinggi adalah 57 kali dengan rata-rata 13,8310 kali, yang berarti bahwa selama 1 tahun komite audit melakukan rapat sebanyak 57 kali dengan rata-rata 13,8310 kali.

Pada variabel jumlah anggota komite audit (AUSIZE) nilai terbesar menunjukkan jumlah anggota komite audit yang paling banyak, dan angka yang terkecil menunjukkan jumlah minimum anggota komite audit di dalam sebuah perusahaan.

Pada variabel total aset (TASIZE) nilai terkecil adalah 15,99, nilai terbesar 32,84 dengan rata-rata 23,1103 dan standar deviasi 2,96. Dari setiap variabel dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas data dari variabel cukup baik.

**Tabel 2. Deskripsi Statistik Seluruh Sampel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
AUINDP	142	0,40	1,00	0,8835	0,18141
AUEXCT	142	0,20	1,00	0,6417	0,25161
AUMEET	142	2,00	57,00	13,8310	12,19753
AUSIZE	142	3,00	7,00	3,6127	0,95166
TASIZE	142	15,99	32,84	23,1103	2,96466
Valid N (listwise)	142				

Pada tabel 3 dan 4 menunjukkan perbandingan: perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* memiliki nilai maksimum yang lebih besar pada variabel frekuensi rapat, jumlah anggota, dan total aset dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report*. Nilai maksimum pada variabel independensi dan keahlian memiliki nilai yang sama. Dan nilai rata-ratanya lebih besar pada variabel frekuensi rapat, jumlah komite audit, dan total aset. Kemudian perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report* nilai rata-ratanya lebih besar pada variabel independensi, dan variabel keahlian.

Tabel 5 menunjukkan bahwa selisih nilai antara blok 0 dan blok 1 sebesar 20.727 dengan tingkat signifikan sebesar 0.001 (probabilitas < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan

tingkat signifikan 5%, variabel independen, keahlian, frekuensi rapat, jumlah anggota, dan total aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

**Tabel 3. Menerbitkan Sustainability report**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
AUINDP	71	0,40	1,00	0,8489	0,19991
AUEXCT	71	0,20	1,00	0,6135	0,25684
AUMEET	71	4,00	57,00	16,7324	13,09521
AUSIZE	71	3,00	7,00	3,8310	01,17091
TASIZE	71	19,10	32,84	23,7284	2,70397
Valid N (listwise)	71				

**Tabel 4. Tidak Menerbitkan Sustainability report**

	N	Min	Max	Mean	Standar Deviation
AUINDP	71	0,50	1,00	0,9176	0,154
AUEXCT	71	0,25	1,00	0,6700	0,24481
AUMEET	71	2,00	50,00	10,9296	10,54
AUSIZE	71	3,00	6,00	3,3944	0,59711
TASIZE	71	15,99	32,51	22,4921	3,10119
Valid N (listwise)	71				

**Tabel 5. Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	20.727	5	.001
	Block	20.727	5	.001
	Mode	20.727	5	.001
	1			

Dari tabel 6 dapat diketahui variabel independensi mempunyai nilai tolerance 0,339 dan VIF 2,948, variabel keahlian komite audit mempunyai nilai tolerance 0,864 dan VIF 1,157, variabel frekuensi rapat komite audit mempunyai nilai tolerance 0,872 dan VIF 1,147, variabel jumlah komite audit mempunyai nilai tolerance 0,343 dan VIF 2,913 dan variabel total aset mempunyai nilai tolerance 0,901 dan VIF 1,110. Dari hasil uji ini diketahui bahwa seluruh variabel independen mempunyai mempunyai nilai VIF < 10, angka Tolerance > 0,1. Hal ini menandakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi multikolinieritas yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,181. Hal ini berarti sebesar 18,1% variabel independen yaitu independensi, keahlian, frekuensi rapat, jumlah anggota komite audit dan total aset mampu

menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu *sustainability report*. Sisanya sebesar 81,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel di dalam penelitian ini.

**Tabel 6. Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	AUINDP	.339 2.948
	AUEXCT	.864 1.157
	AUMEET	.872 1.147
	AUSIZE	.343 2.913
	TASIZE	.901 1.110

a. Dependent Variable: SR

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Step	-2 likelihood	Log Cox & Snell Square	R Nagelkerke Square	R
1	176.127 <sup>a</sup>	.136	.181	

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

**Tabel 8. Uji Koefisien Regresi Variables in the Equation**

	B	S.E.	Df	Sig.
AUINDP	0.38	1.76	1	0.83
AUEXCT	-1.24	0.77	1	0.11
AUMEET	0.04	0.02	1	0.02
AUSIZE	0.33	0.34	1	0.34
TASIZE	0.17	0.07	1	0.02
Constant	-5.11	3.03	1	0.09

a. Variable(s) entered on step 1: AUINDP, AUEXCT, AUMEET, AUSIZE, TASIZE.

Dari tabel 8 diketahui bahwa independensi (AUINDP) memiliki signifikan ( $\text{Sig} = 0,828 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan kata lain H1 ditolak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang menyatakan bahwa independensi komite audit mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Barros et al (2013), Owusu Ansah & Ganguli (2010), Li, Pike, & Haniffa (2008), Abbott et al (2004), Persons (2005), O'Sullivan, Percy, & Stewart (2007).

Sifat yang independen akan berdampak kepada sifat yang tidak memihak yang ditunjukkan dalam sikap transparansi komite audit, Barros et al, (2013). Hal ini dimungkinkan karena semakin independen komite audit di dalam perusahaan maka semakin objektif tindakan yang dilakukan oleh komite audit untuk melindungi seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan yang dilakukan melalui pengungkapan *sustainability report*.

(Allegrini et al, 2011) menyatakan bahwa pengungkapan secara sukarela juga dianggap sebagai mekanisme di dalam kontrol perusahaan dalam melindungi investor dan mengurangi konflik agency. Pengungkapan secara sukarela dianggap sebagai kesempatan dalam menerapkan teori agensi sebagai alat di dalam perusahaan untuk melakukan kontrol (Al-Shammari & Al-Sultan, 2010).

Keahlian komite audit (AUEXCT) memiliki signifikan ( $\text{Sig} = 0,109 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa keahlian komite audit tidak memberikan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan kata lain H1 ditolak.

Jika dilihat dari nilai rata-rata perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report* memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada perusahaan yang menerbitkan. Hal ini berarti bahwa organisasi yang melakukan pengungkapan *sustainability report* tidak sepenuhnya dilatarbelakangi karena adanya komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, sebaliknya perusahaan yang melakukan penerbitan *sustainability report* memiliki keahlian di luar di bidang akuntansi dan keuangan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa komite audit memungkinkan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada organisasi, salah satunya karena mereka memiliki pengalaman bisnis (Braiotta, Gazzaway, Colson, & Ramamoorti, 2010). Selain itu dengan keahlian yang lebih bervariasi dapat lebih efektif dalam melakukan pemantauan yang lebih intens (Baxter & Cotter, 2009).

Frekuensi rapat komite audit (AUMEET) memiliki signifikan ( $\text{Sig} = 0,019 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan kata lain H1 diterima.

Penelitian ini didukung oleh Barros, Boubaker, & Hamrouni (2013), Owusu Ansah & Ganguli (2010), Li, Pike, & Haniffa (2008), O'Sullivan, Percy, & Stewart (2007), Widiyanto (2011), Djuitaningsih & Marsyah (2012), Allegrini & Greco (2011) dan Puspowardhani (2013). Namun menolak penelitian yang dilakukan (Nasir, Ilham, & Utara, 2014). Hal ini berarti semakin banyak komite audit melaksanakan rapat di dalam setahun semakin besar pengaruhnya terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pertemuan komite audit merupakan wadah untuk mempertanggungjawabkan fungsi dari komite audit sendiri kepada dewan komisaris dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Frekuensi pertemuan yang tinggi merupakan salah satu tuntutan komite audit dalam

mempertanggungjawabkan tugasnya sekaligus memberikan informasi terbaru kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Semakin intensnya komite audit melakukan rapat, semakin banyak hal yang dievaluasi, salah satunya adalah ketaatan perusahaan dalam menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan sehubungan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan yang dilaporkan dalam bentuk pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hal ini mengindikasikan semakin sering komite audit melakukan rapat maka dapat menambah keefektifan pengawasan dan penerapan prinsip dan etika dalam peningkatan pengungkapan *sustainability report*.

Jumlah komite audit (AUSIZE) memiliki signifikan ( $\text{Sig} = 0,339 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan kata lain H1 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Dilling (2010) dan (Fitri, 2013). Namun menolak penelitian yang dilakukan (Owusu Ansah & Ganguli, 2010), (Li, Pike, & Haniffa, 2008), dan (Djuitaningsih & Marsyah, 2012).

Khan & Muttakin (2012) dan Al-Shammari & Al-Sultan (2010) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat menjamin pengungkapan dan pengendalian terhadap CSR disclosure. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit memiliki dampak yang signifikan. Besarnya komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* karena semakin besar komite audit, pengawasan yang dilakukan akan semakin maksimal (Djuitaningsih & Marsyah, 2012). Hal ini juga diungkapkan bahwa jumlah komite audit yang besar akan lebih kondusif untuk menerbitkan *earlier ethics* karena ada kemungkinan besar komite audit yang terdiri dari anggota yang dapat mengusulkan dan merekomendasikan pengungkapan *earlier ethics* (Persons, 2008).

Berdasarkan penelitian, hasilnya bertentangan dengan teori yang didapatkan. Hal ini disebabkan karena pembentukan komite audit hanya sebatas pada peraturan yang berlaku sehingga komite audit belum menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sehingga tidak berpengaruh terhadap *sustainability report* (S.B., 2013). Ini dibuktikan dengan nilai minimal antara perusahaan yang menerbitkan dan tidak menerbitkan adalah 3. Nilai ini menandakan bahwa semua perusahaan di dalam penelitian ini sudah menjalankan aturan seperti yang ditetapkan oleh BAPEPAM Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan

kerja komite audit. Namun pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya tidak efektif.

Total aset (TASIZE) memiliki signifikan ( $\text{Sig} = 0,018 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa total aset perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan kata lain H1 diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Allegrini & Greco, 2011) dan Owusu Ansah & Ganguli (2010). Namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan (Nasir, Ilham, & Utara, 2014) dan (Putri, 2013)

Ukuran perusahaan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar, sehingga berdasarkan teori legitimasi perusahaan yang besar tentu memiliki lingkup komunitas yang lebih besar sehingga kontrak sosial di masyarakatpun semakin luas. Hal inilah yang memungkinkan perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar ketimbang perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk menangani konflik kepentingan. Salah satunya menerbitkan *sustainability report*.

Owusu Ansah & Ganguli (2010) menyatakan bahwa menerbitkan *voluntary disclosure* membutuhkan sejumlah dana yang tidak sedikit. Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah besar dana dalam menyusun laporan, oleh karena itu hanya perusahaan yang besar yang lebih memungkinkan menerbitkan *voluntary disclosure* karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hanya frekuensi rapat dan total aset yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap penerbitan *sustainability report*. Sedangkan independensi, keahlian dan jumlah anggota komite audit cenderung tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Mayoritas penelitian mendukung kesimpulan bahwa perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung untuk menerbitkan *sustainability report*. Sedangkan untuk memahami pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap *sustainability report* masih perlu diteliti lebih lanjut karena di dalam penelitian ini hanya frekuensi rapat yang berpengaruh terhadap menerbitkan *sustainability report*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan telah menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Tetapi

dalam pelaksanaannya belum menjalankan tugas dan fungsi secara efektif (Fitri, 2013). Penerbitan *sustainability report* seharusnya didukung sepenuhnya oleh pemangku kepentingan. Bila hal ini dapat dipenuhi maka perusahaan secara sendirinya akan melakukan praktek penerbitan laporan berkelanjutan.

### Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu Sampel pada perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* masih tergolong rendah di Indonesia. Selain itu terbatasnya kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel yang mewakili setiap sektor yang ada. Adapun saran dari peneliti:

- a. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang mencakup seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
- b. Menambah variabel yang lebih bervariasi selain karakteristik komite audit misalnya profitabilitas, leverage, serta melibatkan dewan komisaris, sehingga lebih bervariasi lagi dalam menggambarkan pengaruh komponen-komponen di dalam perusahaan terhadap penerbitan *sustainability report*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004, March). Audit committee characteristics and restatements. *Auditing: a Journal of Practice and Theory*, 23(1), 69-87.
- Allegrini, M., & Greco, G. (2011, February). Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian Listed Companies. *Science Business Media*, 17, 187-216.
- Alleyne, P., Howard, M., & Greenidge, D. (2006). The Role of audit committees in Barbados. *Corporate Governance*, 6(5), 567-581.
- Al-Shammari, B., & Al-Sultan, W. (2010, March). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Kuwait. *International Journal of Disclosure and Governance*, 7(3), 262-280.
- Archelr, P., Crawford, S., & Larrinaga, C. (2009). Social disclosure, legitimacy theory and the role of the state. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(8), 1283-1307.
- Barnett, M. L., & Salomon, R. M. (2006, March). Beyond Dichotomy: The Curvilinear relationship between social responsibility and financial performance. *Strategic Management Journal*, 27, 1101-1122.
- Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. C. (2013, March/April). Corporate Governance And Voluntary Disclosure In France. *Journal of Applied Business Research*, 29(2), 561-577.
- Baxter, P., & Cotter, J. (2009). Audit Committees and Earnings Quality. *Accounting and Finance*
- Benn, S., & Bolton, D. (2013). *Key Concepts in Corporate Social Responsibility*. Sage Publication..
- Boyd, C. (2009). *Sustainability is good business*. Retrieved February 20, 2014 from [http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/546/Sustainability\\_is\\_good\\_business.html](http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/546/Sustainability_is_good_business.html).
- Braiotta, L., Gazzaway, R. T., Colson, R., & Ramamoorti, S. (2010). *The Audit Committee Handbook*. John Wiley & Sons, Inc.
- Caldwell, C., Karri, R., & Vollmar, P. (2006). Principal Theory and Principle Theory: Ethical Governance from the Follower's Perspective. *Journal of Business Ethics*, 207-223.
- Carol, A. A., & Carlos, L. G. (2007). Engaging with organisations in pursuit of improved sustainability accounting and performance. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Clarkson, M. B. (1995, January). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review*, 20(1), 92-117.
- Colbert, B. A. (2007). *Three Conceptions of Triple Bottom Line Business Sustainability and the Role for HRM*. Retrieved Maret 30, 2014, from [www.stakeholderresearch.com](http://www.stakeholderresearch.com).
- Defond, M. L., Hann, R. N., & Hu, X. (2005, November). Does the market value financial expertise on audit committees of boards of directors? *Journal of accounting research*, 42(2), 153-193.
- Dilling, P. F. (2010, January). Sustainability Reporting In A Global Context. *International Business and Economics Research Journal*, 9(1), 19-30.
- Djuitaningsih, T., & Marsyah, W. A. (2012). Pengaruh Manajemen Laba dan

- Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Media Riset Akuntansi*, 2(2), 187-211.
- Fitri G. N (2013). Pengaruh Good Corporate terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kakabadse, N. K., Rozuel, C., & Davies, L. L. (2005). Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review. *International Journal Business Governance and Ethics*, 1(4), 277-302.
- Khan, A., & Muttakin, M. B. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Science and Business*, pp.207-223.
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137-159.
- Lisic, L. L., Neal, T., & Zhang, Y. (2011). Audit Committee Financial Expertise and Restatements.
- Marom, I. Y. (2006). Toward a Unified Theory of. *Business Ethics*, 67, 191-200.
- Moore, W. B. (2012). Sustainability reporting: A work in progress. *Journal of Sustainability and Green Business*, 1-13.
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 1-18.
- O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344-371.
- O'Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. (2007 December). Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and their Association with forward-looking information in the Annual Report. *Science and Business*, 12, 5-35.
- Owusu Ansah, S., & Ganguli, G. (2010). Voluntary Reporting on Internal Control Systems and Governance Characteristics: An Analysis of Large U.S. Companies. *Journal of Managerial Issues*, 22(3), 383-409.
- Persons, O. S. (2005). The Relation between the New Corporate Governance Rules and the Likelihood of Financial Statement Fraud. *Review of Accounting and Finance*, 4(2), 125-148.
- Persons, O. S. (2008 October). Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no fraud firms. *International Journal of disclosure and governance*, 6, 284-297.
- Puspowardhani. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap publikasi sustainability report. Unpublished undergraduated thesis, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Putri, C. D. (2013). Pengaruh Corporate Governance dan Karakterisrik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sustainability Report. Unpublished journal, Universitas Negeri Padang.
- Runhaar, H., & Lafferty, H. (2009). Governing Corporate Social Responsibility: An Assessment of the UN Global Compact to CSR Strategies in the Telecommunications Industry. *Business Ethics*, 84, 479-495.
- Seganish, W. M., & Holter, N. C. (2004 July/August). Complying with the sarbanes oxley. *internal auditing*, 19(4), 22-27.
- Spira, L. F. (1999). Ceremonies of Governance: Perspectives on the Role of the Audit Committee. *Journal of Management & Governance*, 3(3), 231-260.
- Sustainability Reporting Guidelines*. (2006). Retrieved November 2013, from Global Reporting Initiative: <https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>.
- Wartick, S. a. (1994 December). Toward a substantive definition of the corporate issue construct: a review and synthesis of the literature. *Business and Society*, 33(3), 293-311.
- Widianto, H. S. (2011). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report.